

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.12.2.693147/2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
- 3. Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
- 4. Kode/Nama Satker : (693147) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
- Sebesar : Rp. 69.118.000 (ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS DELAPAN BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.12.WA Program Dukungan Manajemen
- 135.12.WA. Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 69.118.000
Rp. 69.118.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 69.118.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 69.118.000

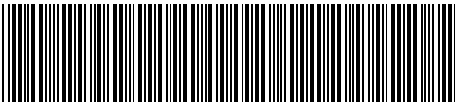
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693147/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:6010-4269-9346-3103

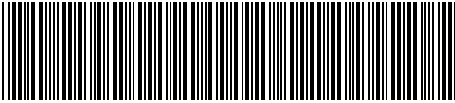
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (693147) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

										Halaman : I A. 1
Program	:	135.12.WA	Program Dukungan Manajemen						69.118.000	
Kegiatan	:	7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah						69.118.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM				2,00	Rekomendasi Kebijakan	59.546.000
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah				2.00	Rekomendasi Kebijakan	59.546.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi				100,00	orang	9.572.000
Rincian Output	:	01	AEF.I01	Diskusi Strategi Kebijakan Hukum				100.00	orang	9.572.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693147/2026
I B. SUMBER DANA



DS:6010-4269-9346-3103

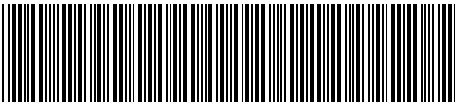
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (693147) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

				Pagu		Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	69.118.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	69.118.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		(dalam ribuan rupiah)

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693147/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6010-4269-9346-3103

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (693147) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

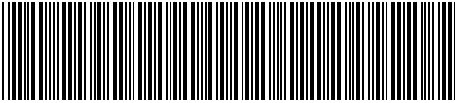
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693147	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA	-	69.118	-	-	-	69.118	04 . 51	
135.12.WA	Program Dukungan Manajemen	-	69.118	-	-	-	69.118		
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	-	69.118	-	-	-	69.118		
7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	59.546	-	-	-	59.546		
01	RM	-	59.546	-	-	-	59.546		
7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	9.572	-	-	-	9.572		
01	RM	-	9.572	-	-	-	9.572	030	
JUMLAH		-	69.118	-	-	-	69.118		

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693147/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:6010-4269-9346-3103

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (693147) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

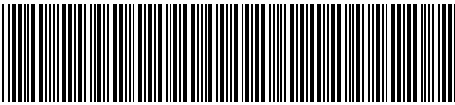
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	693147	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA														
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	14.188	7.000	6.706	6.758	6.608	6.734	7.042	7.020	7.062	0	69.118	
		BELANJA BARANG	0	0	14.188	7.000	6.706	6.758	6.608	6.734	7.042	7.020	7.062	0	69.118	
		Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	0	0	14.188	7.000	6.706	6.758	6.608	6.734	7.042	7.020	7.062	0	69.118	
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	14.188	7.000	6.706	6.758	6.608	6.734	7.042	7.020	7.062	0	69.118	
								</								

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693147/2026
IV A. B L O K I R



DS:6010-4269-9346-3103

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693147] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

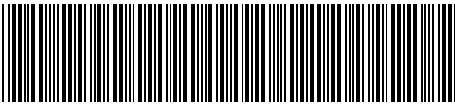
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693147/2026
IV B. C A T A T A N



DS:6010-4269-9346-3103

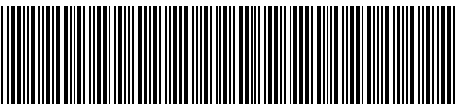
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693147] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.01.2.692025/2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
- 3. Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
- 4. Kode/Nama Satker : (692025) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
- Sebesar : Rp. 17.839.143.000 (TUJUH BELAS MILIAR DELAPAN RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.01.WA Program Dukungan Manajemen
- 135.01.WA. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Jumlah Uang

Rp. 17.839.143.000
Rp. 17.839.143.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 17.839.143.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 17.839.143.000

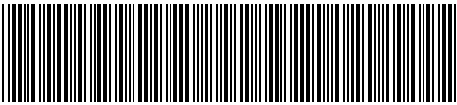
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692025/2026
I A. INFORMASI KINERJA



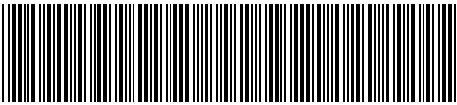
DS:2618-0131-0775-2592

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (692025) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	135.01.WA	Program Dukungan Manajemen			17.839.143.000
Kegiatan	:	7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum			17.839.143.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7099.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,00	Layanan, Perkara	17.137.500.000
Rincian Output	:	01	EBA.001 Layanan Kerja Sama	1.00	Layanan	74.295.000
		02	EBA.959 Layanan Protokoler	1.00	Layanan	63.177.000
		03	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	188.647.000
		04	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	16.789.916.000
		05	EBA.Z03 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	14.580.000
		06	EBA.Z07 Layanan BMN	1.00	Layanan	6.885.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7099.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	26,00	Unit, m2, Paket	511.235.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	26.00	Unit	511.235.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7099.EBC Layanan Manajemen SDM Internal	166,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	74.781.000
Rincian Output	:	01	EBC.Z10 Layanan Manajemen SDM	166.00	Orang	74.781.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7099.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	7,00	Layanan, Rekomendasi	115.627.000
Rincian Output	:	01	EBD.001 Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	1.00	Layanan	45.543.000
		02	EBD.Z25 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.00	Rekomendasi	9.935.000
		03	EBD.Z27 Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Layanan	15.125.000
		04	EBD.Z32 Layanan Reformasi Kinerja	1.00	Layanan	21.263.000
		05	EBD.Z34 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Layanan	5.896.000
		06	EBD.Z36 Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	1.00	Layanan	17.865.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692025/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:2618-0131-0775-2592

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (692025) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

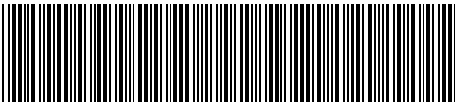
Layanan Manajemen Kinerja Internal

Layanan, Rekomendasi

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692025/2026
I B. SUMBER DANA



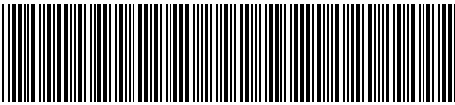
DS:2618-0131-0775-2592

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (692025) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	17.839.143.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	17.839.143.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0
(dalam ribuan rupiah)						

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692025/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN

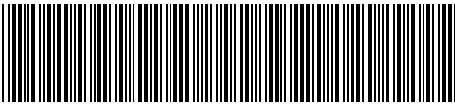


DS:2618-0131-0775-2592

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (692025) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA	13.692.084	3.635.824	511.235	-	-	17.839.143	04 . 51	
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	13.692.084	3.635.824	511.235	-	-	17.839.143		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	13.692.084	3.635.824	511.235	-	-	17.839.143		
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	13.692.084	3.445.416	-	-	-	17.137.500		
01	RM	13.692.084	3.445.416	-	-	-	17.137.500		
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	-	511.235	-	-	511.235		
01	RM	-	-	511.235	-	-	511.235		
7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	74.781	-	-	-	74.781		
01	RM	-	74.781	-	-	-	74.781		
7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	115.627	-	-	-	115.627		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692025/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:2618-0131-0775-2592

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (692025) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

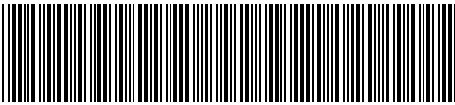
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51] 3	BARANG [52] 4	MODAL [53] 5	BANTUAN SOSIAL [57] 6	LAIN-LAIN [58] 7	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	115.627	-	-	-	115.627	030	
JUMLAH		13.692.084	3.635.824	511.235	-	-	17.839.143		

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692025/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:2618-0131-0775-2592

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (692025) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

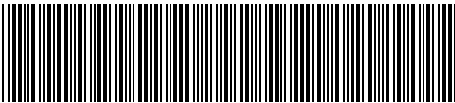
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.279.590	1.280.308	2.510.407	1.467.568	1.471.854	2.575.968	1.316.525	1.263.341	1.263.451	1.241.748	1.112.129	1.056.255	17.839.143
		BELANJA PEGAWAI	982.506	982.506	1.952.415	982.509	982.506	1.952.411	982.506	982.506	982.506	982.506	982.506	944.701	13.692.084
		BELANJA BARANG	297.084	297.802	439.220	354.238	358.527	492.736	334.019	280.835	280.945	259.242	129.623	111.554	3.635.824
		BELANJA MODAL	0	0	118.772	130.821	130.821	130.821	0	0	0	0	0	0	511.235
		Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1.279.590	1.280.308	2.510.407	1.467.568	1.471.854	2.575.968	1.316.525	1.263.341	1.263.451	1.241.748	1.112.129	1.056.255	17.839.143
		51 BELANJA PEGAWAI	982.506	982.506	1.952.415	982.509	982.506	1.952.411	982.506	982.506	982.506	982.506	982.506	944.701	13.692.084
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	297.084	297.802	439.220	354.238	358.527	492.736	334.019	280.835	280.945	259.242	129.623	111.554	3.635.824
		53 BELANJA MODAL	0	0	118.772	130.821	130.821	130.821	0	0	0	0	0	0	511.235

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692025/2026
IV A. B L O K I R



DS:2618-0131-0775-2592

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692025] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

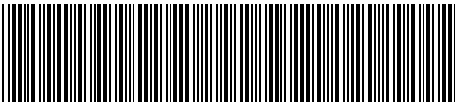
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692025/2026
IV B. C A T A T A N



DS:2618-0131-0775-2592

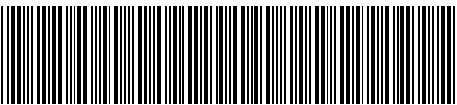
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692025] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692065/2026**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
- 3. Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
- 4. Kode/Nama Satker : (692065) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
- Sebesar : Rp. 1.585.775.000 (SATU MILIAR LIMA RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 135.04.BF.7110 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 1.585.775.000
Rp. 1.585.775.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 1.585.775.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 1.585.775.000

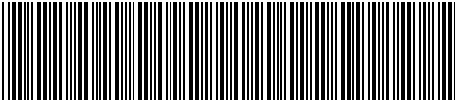
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692065/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0335-0208-6540-0828

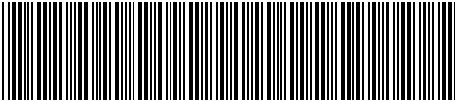
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (692065) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

										Halaman : I A. 1
Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							1.585.775.000
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah							1.585.775.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		4,00	layanan			629.545.000
Rincian Output	:	01	BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		4,00	layanan			629.545.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga		1,00	Perkara			3.804.000
Rincian Output	:	01	BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah		1,00	Perkara			3.804.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		7,00	Lembaga			902.820.000
Rincian Output	:	01	BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah		7,00	Lembaga			902.820.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan			49.606.000
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah		1,00	Laporan			49.606.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692065/2026
I B. SUMBER DANA



DS:0335-0208-6540-0828

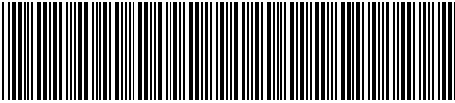
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (692065) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	1.585.775.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692065/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



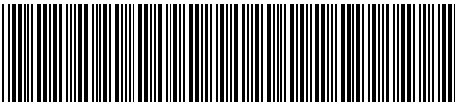
DS:0335-0208-6540-0828

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (692065) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692065	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA	-	1.585.775	-	-	-	1.585.775	04 . 51	
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.585.775	-	-	-	1.585.775		
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	1.585.775	-	-	-	1.585.775		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	629.545	-	-	-	629.545		
04	PNBP	-	629.545	-	-	-	629.545		
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	3.804	-	-	-	3.804		
04	PNBP	-	3.804	-	-	-	3.804		
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	902.820	-	-	-	902.820		
04	PNBP	-	902.820	-	-	-	902.820		
7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	49.606	-	-	-	49.606	04 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692065/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0335-0208-6540-0828

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (692065) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

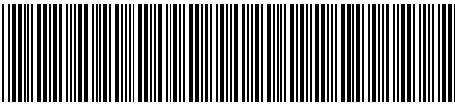
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP	-	49.606	-	-	-	49.606	030@	
JUMLAH		-	1.585.775	-	-	-	1.585.775		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692065/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0335-0208-6540-0828

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (692065) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

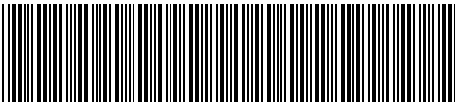
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692065	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	65.683	65.683	207.825	172.191	159.879	165.385	192.551	185.622	153.380	121.301	54.137	42.135	1.585.775
		BELANJA BARANG	65.683	65.683	207.825	172.191	159.879	165.385	192.551	185.622	153.380	121.301	54.137	42.135	1.585.775
		Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	65.683	65.683	207.825	172.191	159.879	165.385	192.551	185.622	153.380	121.301	54.137	42.135	1.585.775
	135.04.BF.7110	52 BELANJA BARANG DAN JASA	65.683	65.683	207.825	172.191	159.879	165.385	192.551	185.622	153.380	121.301	54.137	42.135	1.585.775

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692065/2026
IV A. B L O K I R



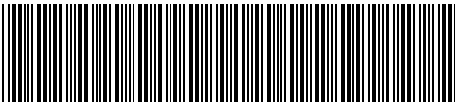
DS:0335-0208-6540-0828

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692065] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692065	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 671.235	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 671.235	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.818
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.654	521211	Belanja Bahan(PNBP)
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 222
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
521213	Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.650	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.176
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.300	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026	521211	Belanja Bahan(PNBP)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 53.700
522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 44.208	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026	521213	Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 308.100
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 97.440	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026	522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.490
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.597	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692065/2026
IV A. B L O K I R



DS:0335-0208-6540-0828

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692065] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

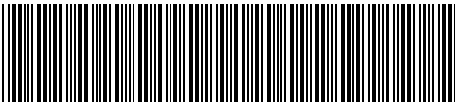
Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7110.FAE	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.638 Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.332 Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 33.992 Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.850 Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.068 Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692065/2026
IV B. C A T A T A N



DS:0335-0208-6540-0828

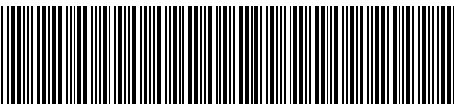
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692065] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.05.2.693012/2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
- 3. Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (693012) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
- Sebesar : Rp. 3.170.003.000 (TIGA MILIAR SERATUS TUJUH PULUH JUTA TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 135.05.BF.7121 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 3.170.003.000
Rp. 3.170.003.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 3.170.003.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 3.170.003.000

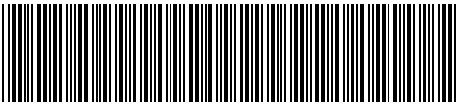
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693012/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0338-9202-0870-2258

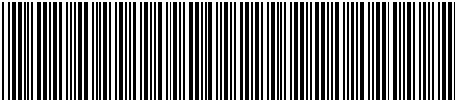
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (693012) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

										Halaman : I A. 1
Program	:	135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							3.170.003.000
Kegiatan	:	7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah							3.170.003.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi					150,00 orang	60.000.000
Rincian Output	:	01	AEF.I01	Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual					150.00 orang	60.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya					2,00 layanan	2.645.717.000
Rincian Output	:	01	BAH.001	Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah					1.00 layanan	1.670.240.000
		02	BAH.002	Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah					1.00 layanan	975.477.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7121.BMA	Data dan Informasi Publik					2,00 dokumen, Peta, Data	464.286.000
Rincian Output	:	01	BMA.001	Data dan Informasi Kekayaan Intelektual di wilayah					2.00 Data	464.286.000

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693012/2026
I B. SUMBER DANA



DS:0338-9202-0870-2258

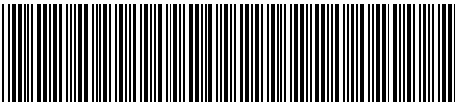
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (693012) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	3.170.003.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693012/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0338-9202-0870-2258

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (693012) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

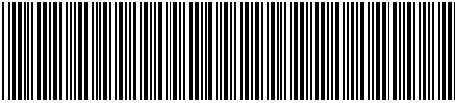
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693012	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA	-	3.170.003	-	-	-	3.170.003	04 . 51 030@ 04 . 51 030@ 04 . 51 030@	
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	3.170.003	-	-	-	3.170.003		
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	3.170.003	-	-	-	3.170.003		
7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	60.000	-	-	-	60.000		
04	PNBP	-	60.000	-	-	-	60.000		
7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	2.645.717	-	-	-	2.645.717		
04	PNBP	-	2.645.717	-	-	-	2.645.717		
7121.BMA	Data dan Informasi Publik (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	464.286	-	-	-	464.286		
04	PNBP	-	464.286	-	-	-	464.286		
JUMLAH		-	3.170.003	-	-	-	3.170.003		

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693012/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0338-9202-0870-2258

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (693012) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

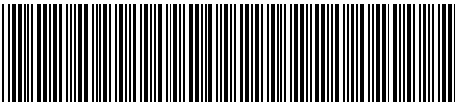
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693012	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	4.766	379.867	327.562	447.588	92.276	782.458	158.830	422.032	304.524	201.284	44.038	4.780	3.170.003
		BELANJA BARANG	4.766	379.867	327.562	447.588	92.276	782.458	158.830	422.032	304.524	201.284	44.038	4.780	3.170.003
		Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	4.766	379.867	327.562	447.588	92.276	782.458	158.830	422.032	304.524	201.284	44.038	4.780	3.170.003
135.05.BF.7121		52 BELANJA BARANG DAN JASA	4.766	379.867	327.562	447.588	92.276	782.458	158.830	422.032	304.524	201.284	44.038	4.780	3.170.003

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693012/2026
IV A. B L O K I R



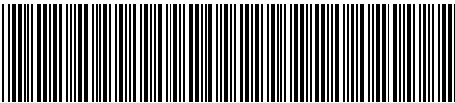
DS:0338-9202-0870-2258

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693012] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693012	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 52.487
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 1.092.852		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	52 Belanja Barang Rp. 1.092.852	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.580
7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.110	522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 284.686
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 540	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 160.033
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.570	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.475
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 105.856		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.321
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 200		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 242.887
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522141	Belanja Sewa(PNBP)		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693012/2026
IV A. B L O K I R



DS:0338-9202-0870-2258

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693012] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

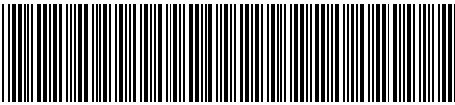
Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7121.BMA	Data dan Informasi Publik 521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.545 Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.740 Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 130.253 Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.569 Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693012/2026
IV B. C A T A T A N



DS:0338-9202-0870-2258

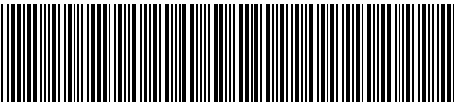
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693012] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001



DS:3878-9560-0589-8538

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.03.2.693045/2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 - 2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 - 3. Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
 - 4. Kode/Nama Satker : (693045) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
 - Sebesar : Rp. 261.354.000 (DUA RATUS ENAM PULUH SATU JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.03.BB Program Pembentukan Regulasi
135.03.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang
Rp. 261.354.000
Rp. 261.354.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	261.354.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 261.354.000

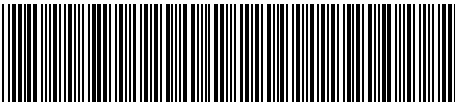
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693045/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3878-9560-0589-8538

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (693045) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

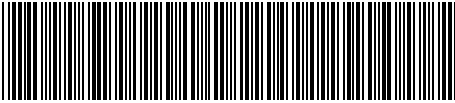
Halaman : I A. 1

Program	:	135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi				261.354.000	
Kegiatan	:	7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah				261.354.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		100,00	Rekomendasi Kebijakan	225.167.000
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Hasil Harmonisasi Produk Hukum Daerah		100.00	Rekomendasi Kebijakan	225.167.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7129.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1,00	Lembaga	29.892.000
Rincian Output	:	01	BDB.001	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah		1.00	Lembaga	29.892.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	6.295.000
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah		1.00	Laporan	6.295.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693045/2026
I B. SUMBER DANA



DS:3878-9560-0589-8538

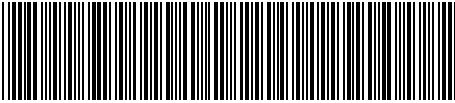
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (693045) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

						Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	261.354.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	261.354.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693045/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3878-9560-0589-8538

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (693045) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

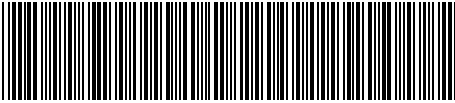
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693045	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA	-	261.354	-	-	-	261.354	04 . 51	
135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	261.354	-	-	-	261.354		
7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	261.354	-	-	-	261.354		
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	225.167	-	-	-	225.167		
01	RM	-	225.167	-	-	-	225.167		
7129.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	29.892	-	-	-	29.892		
01	RM	-	29.892	-	-	-	29.892		
7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	6.295	-	-	-	6.295		
01	RM	-	6.295	-	-	-	6.295		
JUMLAH		-	261.354	-	-	-	261.354		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693045/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:3878-9560-0589-8538

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (693045) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

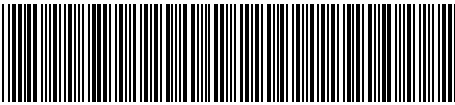
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693045	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	20.135	19.836	18.089	23.136	29.317	29.199	57.647	19.772	44.222	0	0	261.354
		BELANJA BARANG	0	20.135	19.836	18.089	23.136	29.317	29.199	57.647	19.772	44.222	0	0	261.354
		Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	0	20.135	19.836	18.089	23.136	29.317	29.199	57.647	19.772	44.222	0	0	261.354
	135.03.BB.7129	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	20.135	19.836	18.089	23.136	29.317	29.199	57.647	19.772	44.222	0	0	261.354

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693045/2026
IV A. B L O K I R



DS:3878-9560-0589-8538

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693045] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

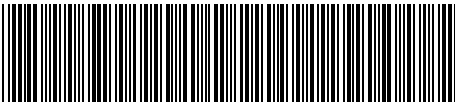
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693045/2026
IV B. C A T A T A N



DS:3878-9560-0589-8538

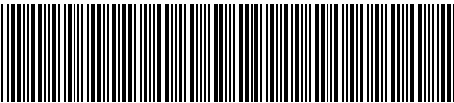
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693045] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.11.2.693113/2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
- 3. Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (693113) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
- Sebesar : Rp. 1.702.281.000 (SATU MILIAR TUJUH RATUS DUA JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.702.281.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 1.702.281.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

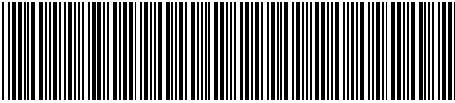
ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.11.2.693113/2026

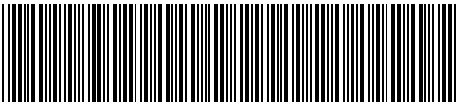


DS:6874-8650-0890-2206

Satker : (693113) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	21.558.000
BB.7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	Rp.	21.558.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	1.680.723.000
BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	1.680.723.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693113/2026
I A. INFORMASI KINERJA

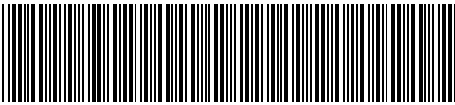


DS:6874-8650-0890-2206

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (693113) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

										Halaman : I A. 1
Program	:	135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi							21.558.000
Kegiatan	:	7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah							21.558.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		1,00	Rekomendasi Kebijakan			21.558.000
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum di Daerah		1.00	Rekomendasi Kebijakan			21.558.000
Program	:	135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							1.680.723.000
Kegiatan	:	7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah							1.680.723.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		9,00	Lembaga			26.279.000
Rincian Output	:	01	BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah		9.00	Lembaga			26.279.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7136.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		300,00	Orang			27.800.000
Rincian Output	:	01	BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum di Daerah		300.00	Orang			27.800.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		26,00	Lembaga			28.114.000
Rincian Output	:	01	BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah		26.00	Lembaga			28.114.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7136.BMA	Data dan Informasi Publik		1,00	dokumen, Peta, Data			26.374.000
Rincian Output	:	01	BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah		1.00	Data			26.374.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693113/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:6874-8650-0890-2206

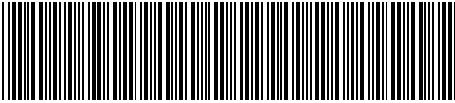
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (693113) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

Klasifikasi Rincian Output	5	:	7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		202,00	Orang	1.292.800.000
Rincian Output		:	01 QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	(PN)	202.00	Orang	1.292.800.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		26,00	Kelompok Masyarakat	221.936.000
Rincian Output		:	01 QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	(PN)	26.00	Kelompok Masyarakat	221.936.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1,00	Lembaga	57.420.000
Rincian Output		:	01 QDB.001	Layanan Pendampingan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan	(PN)	1.00	Lembaga	57.420.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693113/2026
I B. SUMBER DANA



DS:6874-8650-0890-2206

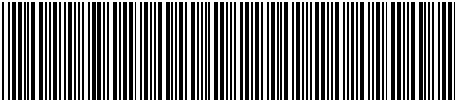
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (693113) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

				Pagu		Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	1.702.281.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.702.281.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		(dalam ribuan rupiah)

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693113/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



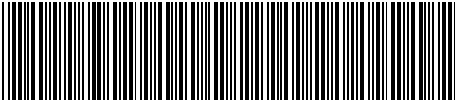
DS:6874-8650-0890-2206

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (693113) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693113	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA	-	1.702.281	-	-	-	1.702.281	04 . 51	
135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	21.558	-	-	-	21.558		
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	-	21.558	-	-	-	21.558		
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	21.558	-	-	-	21.558		
01 RM		-	21.558	-	-	-	21.558		
135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.680.723	-	-	-	1.680.723		
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	1.680.723	-	-	-	1.680.723		
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	26.279	-	-	-	26.279		
01 RM		-	26.279	-	-	-	26.279		
7136.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	27.800	-	-	-	27.800		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693113/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



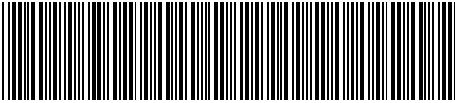
DS:6874-8650-0890-2206

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (693113) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	27.800	-	-	-	27.800	030	
7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	28.114	-	-	-	28.114	04 . 51	
01 RM		-	28.114	-	-	-	28.114	030	
7136.BMA	Data dan Informasi Publik (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	26.374	-	-	-	26.374	04 . 51	
01 RM		-	26.374	-	-	-	26.374	030	
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	1.292.800	-	-	-	1.292.800	04 . 51	
01 RM		-	1.292.800	-	-	-	1.292.800	030	
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	221.936	-	-	-	221.936	04 . 51	
01 RM		-	221.936	-	-	-	221.936	030	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693113/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6874-8650-0890-2206

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (693113) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

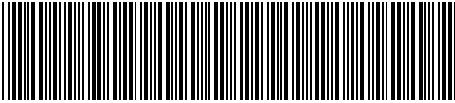
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	57.420	-	-	-	57.420	04 . 51	
	01 RM	-	57.420	-	-	-	57.420	030	
JUMLAH		-	1.702.281	-	-	-	1.702.281		

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693113/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:6874-8650-0890-2206

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (693113) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

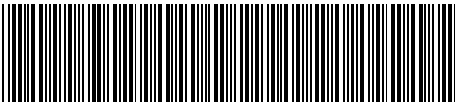
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693113	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	24.176	293.036	120.827	181.414	247.657	141.965	0	275.000	93.470	125.000	199.736	1.702.281
	135.11.BB.7133	BELANJA BARANG	0	24.176	293.036	120.827	181.414	247.657	141.965	0	275.000	93.470	125.000	199.736	1.702.281
		Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	0	187	1.462	3.120	12.589	0	4.200	0	0	0	0	0	21.558
	135.11.BF.7136	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	187	1.462	3.120	12.589	0	4.200	0	0	0	0	0	21.558
		Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	0	23.989	291.574	117.707	168.825	247.657	137.765	0	275.000	93.470	125.000	199.736	1.680.723
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	23.989	291.574	117.707	168.825	247.657	137.765	0	275.000	93.470	125.000	199.736	1.680.723

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693113/2026
IV A. B L O K I R



DS:6874-8650-0890-2206

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693113] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

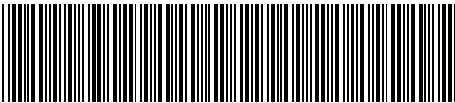
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693113/2026
IV B. C A T A T A N



DS:6874-8650-0890-2206

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693113] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001